KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI Tahun 2010

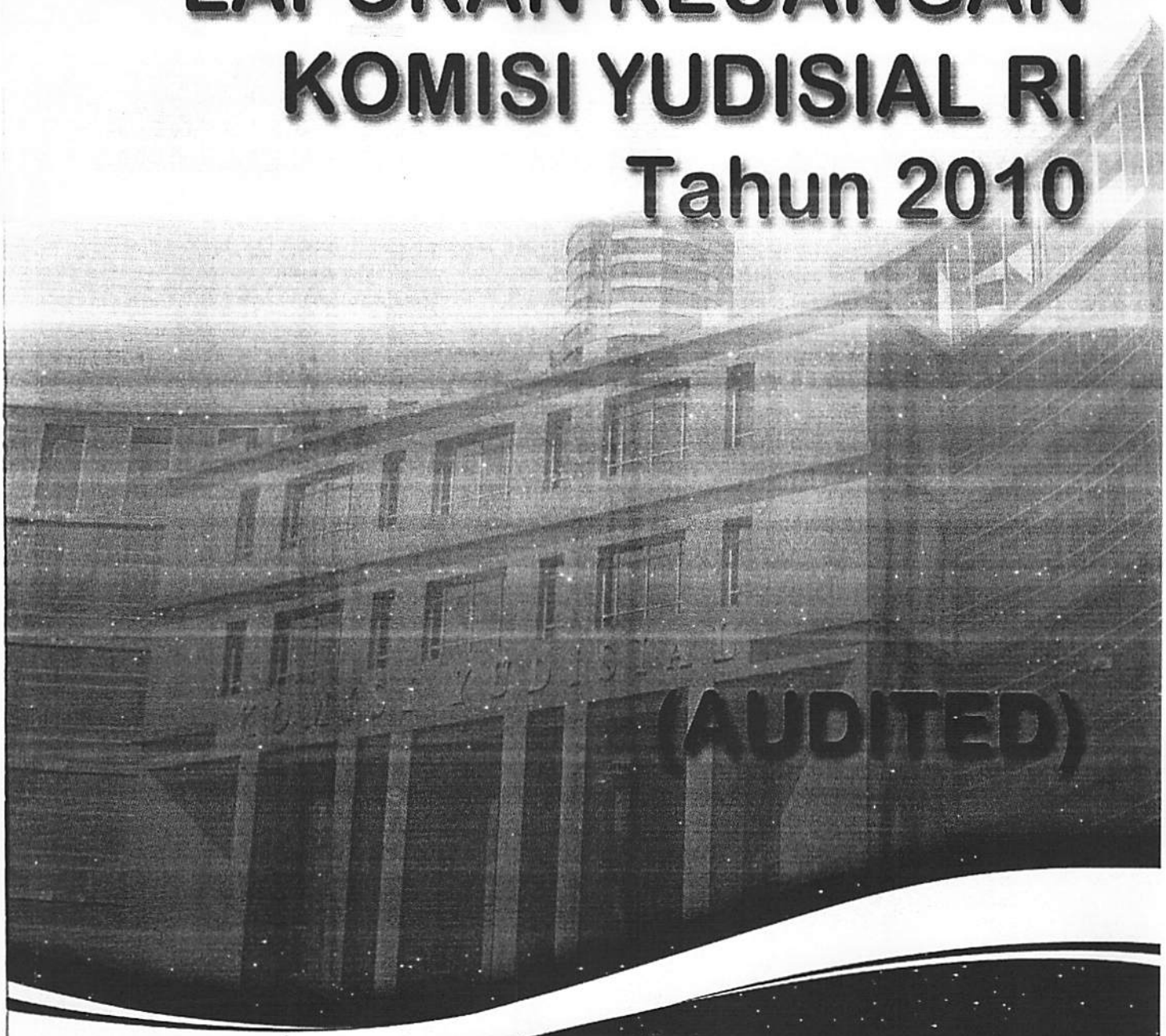

(AUDITED)

Jl. Kramat Raya No.57 Jakarta Pusat
Telp: 021-390 5455, Fax : 021-390 5455, PO BOX 2685.

BAGIAN ANGGARAN 100
KOMISI YUDISIAL RI

LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
TAHUN ANGGARAN 2010

(*Audited*)

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. (021) - 31903644

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Yudisial RI adalah salah satu Lembaga Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-51/PB/2008, sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp211.131.399,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp54.173.126.242,00 atau 92,65% dari yang dianggarkan dalam DIPA Rp58.473.572.000,00.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2010. Dari neraca tersebut, diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp148.594.978.005,00 dan Kewajiban sebesar Rp73.787.464,00 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp148.521.190.541,00.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
4. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 ini berstatus sebagai Laporan keuangan yang telah diperiksa *(Audited)* oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik, yang membangun dari para pengguna laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 10 Mei 2011

Sekretaris Jenderal

Muzayyin Mahbub
NIP 19530605 198003 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan	vii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Pernyataan Telah Direviu	xi
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT Perbandingan 2010 dan 2009)	
III. Neraca (NSAIKPT Perbandingan 2010 dan 2009)	
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	4
A. Penjelasan Umum	4
A.1. Dasar Hukum	4
A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga	4
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.4. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	13
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	13
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
B.3. Catatan Penting Lainnya	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Penjelasan Umum Neraca	23
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	24
C.3. Catatan Penting Lainnya	37
D. Pengungkapan Penting Lainnya	39
D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	39
D.2. Rekening Pemerintah	41
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	41
D.4. Pengungkapan Lain-Lain	41

DAFTAR TABEL

1. Tabel Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2009 1
2. Tabel Perbandingan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 2
3. Tabel Realisasi Pendapatan Tahun 2010 dan 2009 6
4. Tabel Rincian Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2010 dan 2009 7
5. Tabel Rincian Realisasi Per Program Tahun 2010 dan 2009 7
6. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2010 13
7. Tabel Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2010 dan 2009 15
8. Tabel Realisasi Belanja Negara Tahun 2010 dan 2009 15
9. Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2010 dan 2009 16
10. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2010 dan 2009 17
11. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Tahun 2010 dan 2009 18
12. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun 2010 dan 2009 18
13. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2010 dan 2009 19
14. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2010 dan 2009 19
15. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2010 dan 2009 20
16. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun 2010 dan 2009 20
17. Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2010 dan 2009 21
18. Tabel Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2010 dan 2009 23
19. Tabel Uang Persediaan Tahun 2010 24
20. Tabel Tambahan Uang Persediaan Tahun 2010 25
21. Tabel Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2010 dan 2009 25
22. Tabel Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2010 dan 2009 26
23. Tabel Persediaan Per 31 Desember 2010 26
24. Tabel Perbandingan Aset Tetap Per 31 Desember 2010 dan 2009 27
25. Tabel Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN Tahun 2010 28
26. Tabel Perbandingan Tanah Per 31 Desember 2010 dan 2009 29
27. Tabel Perbandingan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2010 dan 2009 29
28. Tabel Perbandingan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2010 dan 2009 30
29. Tabel Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2010 31
30. Tabel Perbandingan Jaringan Per 31 Desember 2010 dan 2009 31
31. Tabel Perbandingan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2010 dan 2009 32
32. Tabel Perbandingan Aset Lainnya Per 31 Desember 2010 dan 2009 32
33. Tabel Perbandingan Hutang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2010 dan 2009 33
34. Tabel Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2010 dan 2009 34

35. Tabel Perbandingan Pendapatan yang Ditangguhkan Per 31 Desember 2010 dan 2009 34
36. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Lancar Per 31 Desember 2010 dan 2009 35
37. Tabel Perbandingan Cadangan Persediaan Per 31 Desember 2010 dan 2009 35
38. Tabel Perbandingan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2010 dan 2009 36
39. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Investasi Per 31 Desember 2010 dan 2009 36
40. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Per 31 Desember 2010 dan 2009 37
41. Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Per 31 Desember 2010 dan 2009 37
42. Tabel Pembelian Sistem Aplikasi 38
43. Tabel Pemasangan Partisi Gedung 38
44. Tabel Pengadaan Peralatan dan Mesin 38

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik Komposisi Realisasi PNBP 14
2. Grafik Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2010 16
3. Grafik Komposisi Neraca Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 23
4. Grafik Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan Tahun 2010 dan 2009
2. Neraca Perbandingan Per 31 Desember 2010 dan 2009
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Neraca Percobaan Per 31 Desember 2010
7. Laporan SABMN
8. Laporan Kondisi Barang
9. Laporan Barang Persediaan
10. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca
11. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2010
12. Monitoring Penutupan Rekening Komisi Yudisial RI
13. Monitoring Penyelesaian Tindak Komisi Yudisial RI terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Internal Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2009
14. Monitoring Penyelesaian Tindak Komisi Yudisial RI terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2009
15. Daftar Rekening Komisi Yudisial RI tahun 2010
16. Berita Acara Pemeriksaan Kas selama Tahun 2010
17. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI Per 31 Desember 2010
18. BA Rekonsiliasi dengan DIT. APK Dirjen Perbendaharaan
19. BA Rekonsiliasi dengan KPPN Jakarta IV
20. BA Rekonsiliasi dengan DIT. EAS - DJPU
21. Rekapitulasi Setoran SSBP selama Tahun 2010
22. Rekapitulasi Setoran SSPB selama Tahun 2010

DAFTAR SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN – P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	:	Bendahara Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Angaran
LRA	:	Lapoan Realisasi Anggaran
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan/Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK – BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

			Halaman
LAPORAN REALISASI APBN			
	Penjelasan Umum		
Catatan	A.1	Dasar Hukum	4
Catatan	A.2	Kebijakan Teknis Komisi Yudisial RI	4
Catatan	A.3	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
Catatan	A.4	Kebijakan Akuntansi	8
	Penjelasan Atas Pos-pos Realisasi Anggaran		
Catatan	B.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	13
Catatan	B.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran	14
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	14
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	14
	Belanja Negara		
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	15
Catatan	B.2.2.1	Belanja	16
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	17
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	18
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	21
	Catatan Penting Lainnya		
Catatan	B.2.3	Catatan Penting Lainnya	21
NERACA			
ASET			
	Aset Lancar		
Catatan	C.1	Penjelasan Umum Neraca	23
Catatan	C.2	Penjelasan per Pos Neraca	24
Catatan	C.2.1	Aset Lancar	24
Catatan	C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	24
Catatan	C.2.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	25
Catatan	C.2.1.3	Persediaan	26
	Aset Tetap		
Catatan	C.2.2	Aset Tetap	26
Catatan	C.2.2.1	Tanah	28
Catatan	C.2.2.2	Gedung dan Bangunan	29
Catatan	C.2.2.3	Peralatan dan Mesin	29

Catatan	C.2.2.4	Jaringan	31
Catatan	C.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	32
	Aset Lainnya		
Catatan	C.2.3	Aset Lainnya	32
KEWAJIBAN			
	Kewajiban Jangka Pendek		
Catatan	C.2.4	Kewajiban Jangka Pendek	33
Catatan	C.2.4.1	Uang Muka dari KPPN	33
Catatan	C.2.4.2	Utang kepada Pihak Ketiga	33
Catatan	C.2.4.3	Pendapatan Diterima Dimuka	34
Catatan	C.2.4.4	Pendapatan yang Ditangguhkan	34
EKUITAS			
	Ekuitas Dana Lancar		
Catatan	C.2.5	Ekuitas Dana Lancar	34
Catatan	C.2.5.1	Cadangan Persediaan	35
Catatan	C.2.5.2	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	36
Catatan	C.2.5.3	Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan	36
	Ekuitas Dana Investasi		
Catatan	C.2.6	Ekuitas Dana Investasi	36
Catatan	C.2.6.1	Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	37
Catatan	C.2.6.2	Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	37
	Catatan Penting Lainnya		
Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	37
	Pengungkapan Penting Lainnya		
Catatan	D.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK RI	39
Catatan	D.1.1	Atas Sistem Pengendalian Intern Komisi Yudisial RI	39
Catatan	D.1.2	Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	39
Catatan	D.2	Rekening Pemerintah	41
Catatan	D.3	Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual	41
Catatan	D.4	Pengungkapan Lain-lain	42
Catatan	D.4.1	Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Komisi Yudisial	42
Catatan	D.4.2	Ketentuan Perundang-Undangan	42
Catatan	D.4.3.	Komisioner (Anggota Komisi Yudisial)	42
Catatan	D.4.4	Domisili	42

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL RI

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 *(Audited)* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 10 Mei 2011

Sekretaris Jenderal,

Muzayyin Mahbub
NIP 19530605 198003 1 001

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI YUDISIAL RI
TAHUN ANGGARAN 2010

Kami telah mereviu Laporan Keuangan tahunan untuk Tahun Anggaran 2010 berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Jakarta, 10 Mei 2011

Penanggung Jawab

Danang Wijayanto
NIP.19620402 198203 1 001

I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI yang telah diperiksa *(Audited)* oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2010 *audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp211.131.399,00 walaupun dalam Tahun Anggaran 2010 pendapatan tidak dianggarkan dalam DIPA.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp54.173.126.242,00 atau mencapai 92,65% dari anggarannya. Jumlah realisasi belanja tersebut seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

Ringkasan perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

Uraian	Tahun 2010		Tahun 2009	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	211.131.399	0	17.147.237
Belanja Rupiah Murni	58.473.572.000	54.173.126.242,00	99.779.082.000	89.237.666.378,00
Belanja Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp148.594.978.005,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.089.524.519,00 , Aset Tetap sebesar Rp146.205.251.886,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.300.201.600,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp73.787.464,00. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp148.521.190.541,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.015.737.055,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp147.505.453.486,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

Uraian	Tanggal Neraca		Nilai Kenaikan/ (Penurunan)
	31-12- 2010	31-12- 2009	
Aset	**148.594.978.005**	**146.340.157.486**	**2.254.820.519**
Aset Lancar	1.089.524.519	684.295.384	405.229.135
Aset Tetap	146.205.251.886	144.466.785.502	1.738.466.384
Aset Lainnya	1.300.201.600	1.189.076.600	111.125.000
Kewajiban	**73.787.464**	**532.283.451**	**(458.495.987)**
Kewajiban Jangka Pendek	73.787.464	532.283.451	**(458.495.987)**
Ekuitas Dana	**148.521.190.541**	**145.807.874.035**	**2.713.316.506**
Ekuitas Dana Lancar	1.015.737.055	152.011.933	863.725.122
Ekuitas Dana Investasi	147.505.453.486	145.655.862.102	1.849.591.384
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	**148.594.978.005**	**146.340.157.486**	**2.254.820.519**

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

KOMISI YUDISIAL RI

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(*Audited*)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (*FACE REPORT*)
PERBANDINGAN TAHUN 2010 DAN 2009

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 0 Mei 2011
Halaman :
Prog.Id : lu_pacait

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

No	URAIAN	2010				2009			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	0	211,131,399	211,131,399	0.00	0	17,147,237	17,147,237	0.00
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	0	211,131,399	211,131,399	0.00	0	17,147,237	17,147,237	0.00
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	211,131,399	211,131,399	0.00	0	17,147,237	17,147,237	0.00
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A.II)	0	211,131,399	211,131,399	0.00	0	17,147,237	17,147,237	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	58,473,572,000	54,173,126,242	(4,300,445,758)	92.65	99,779,082,000	89,237,666,378	(10,541,415,622)	89.44
B.I.1	Rupiah Murni	58,473,572,000	54,173,126,242	(4,300,445,758)	92.65	99,779,082,000	89,237,666,378	(10,541,415,622)	89.44
B.I.1.a	Belanja Pegawai	6,283,934,000	6,202,123,278	(81,810,722)	98.70	6,113,072,000	5,365,395,584	(747,676,416)	87.77
B.I.1.b	Belanja Barang	50,614,888,000	46,448,992,726	(4,165,895,274)	91.77	49,543,270,000	40,783,889,327	(8,759,380,673)	82.32
B.I.1.c	Belanja Modal	1,574,750,000	1,522,010,238	(52,739,762)	96.65	44,122,740,000	43,088,381,467	(1,034,358,533)	97.66
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap. : LRAKT
Tanggal : 3 Mei 2011
Halaman : 2
Prog.Id : _pusat

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

No	URAIAN	2010				2009			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B.II)	58,473,572,000	54,173,126,242	(4,300,445,758)	92.65	99,779,082,000	89,237,666,378	(10,541,415,622)	89.43
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, 31 Desember 2010
SEKRETARIS JENDERAL KYRI

Muzayyin Mahbub
NIP. 19530605 198003 1 001

KOMISI YUDISIAL RI

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(*Audited*)

NERACA (FACE REPORT)
PERBANDINGAN PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH)

EMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2010	2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
SET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	558,839	16,107,892	(15,549,053)	(96.53)
Persediaan	1,088,965,680	668,187,492	420,778,188	62.97
JUMLAH ASET LANCAR	1,089,524,519	684,295,384	405,229,135	59.21
SET TETAP				
Tanah	47,188,389,400	47,188,389,400	0	0.00
Peralatan dan Mesin	26,363,320,178	25,161,111,089	1,202,209,089	4.77
Gedung dan Bangunan	68,674,690,857	68,335,915,562	338,775,295	0.49
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,421,134,028	3,121,134,028	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	557,717,423	360,235,423	197,482,000	54.82
JUMLAH ASET TETAP	146,205,251,886	144,466,785,502	1,738,466,384	1.20
SET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,300,201,600	1,189,076,600	111,125,000	9.34
JUMLAH ASET LAINNYA	1,300,201,600	1,189,076,600	111,125,000	9.34
JUMLAH ASET	148,594,978,005	146,340,157,486	2,254,820,519	1.54
KEWAJIBAN				
WAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	63,430,625	516,175,559	(452,744,934)	(87.71)
Pendapatan Diterima di Muka	9,798,000	0	9,798,000	0.00
Pendapatan Yang Ditangguhkan	558,839	16,107,892	(15,549,053)	(96.53)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	73,787,464	532,283,451	(458,495,987)	(86.13)
JUMLAH KEWAJIBAN	73,787,464	532,283,451	(458,495,987)	(86.13)
EKUITAS DANA				
UITAS DANA LANCAR				
adangan Persediaan	1,088,965,680	668,187,492	420,778,188	62.97
ana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka	-63,430,625	-516,175,559	452,744,934	(87.71)
arang/Jasa Yang Harus Diserahkan	-9,798,000	0	(9,798,000)	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	1,015,737,055	152,011,933	863,725,122	568.19
UITAS DANA INVESTASI				
iinvestasikan Dalam Aset Tetap	146,205,251,886	144,466,785,502	1,738,466,384	1.20
iinvestasikan Dalam Aset Lainnya	1,300,201,600	1,189,076,600	111,125,000	9.34
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	147,505,453,486	145,655,862,102	1,849,591,384	1.26
JUMLAH EKUITAS DANA	148,521,190,541	145,807,874,035	2,713,316,506	1.86

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2010	2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	148,594,978,005	146,340,157,486	2,254,820,519	1.54

Jakarta, 31 Desember 2010
SEKRETARIS JENDERAL KYRI

Muzayyin Mahbub
NIP. 19530605 198003 1 001

KOMISI YUDISIAL RI

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(*Audited*)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/ tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Infomasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan; dan
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standard Reviu atas Pelaporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI YUDISIAL RI

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS KOMISI YUDISIAL RI

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan professional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan Calon Hakim Agung yang berakhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten.
b. Mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan.
c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan calon Hakim Agung yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.

c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan dan meningkatkan sikap kewaspadaan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.

d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar azas kepastian dan keadilan hukum agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap lembaga peradilan yang berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.

Pendapatan

PENDAPATAN KOMISI YUDISIAL RI

Realisasi pendapatan pada tahun 2010 berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan nilai sebesar Rp211.131.399,00. Dibandingkan, dengan realisasi tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp193.984.162,00 sebagaimana terlihat pada daftar berikut:

TABEL REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 DAN 2009

dalam rupiah

No.	URAIAN PENDAPATAN	REALISASI PNBP		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2010	2009	
1	Jasa Giro	0	13.575.842	(13.575.842)
2	Denda	3.785.507	3,386,395	399.112
3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	147.157.892	185,000	146.972.892
4	Pendapatan Sewa/Kantor oleh BRI	58.788.000	0	58.788.000
5	Pendapatan lain-lain	1.000.000	0	1.000.000
6	Pendapatan Penghapusan	400.000	0	400.000
	JUMLAH	211.131.399	17,147,237	193.984.162

Kenaikan tersebut terutama diakibatkan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang sangat besar, juga pendapatan sewa ruangan untuk kantor cabang pembantu Bank BRI, pendapatan lain-lain serta hasil dari penghapusan atas penjualan aset, serta denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Belanja

BELANJA KOMISI YUDISIAL RI

Realisasi belanja pada tahun 2010 adalah sebesar Rp54.176.486.902,00 sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp3.360.660,00 sehingga realisasi belanja bersih sebesar Rp54.173.126.242,00 atau mencapai 92,65% dari pagu anggarannya sebesar Rp58.473.572.000,00. Dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2009 sebesar Rp89.237.666.378,00 secara keseluruhan terjadi penurunan sebesar Rp35.064.540.136,00. Penurunan yang sangat besar terjadi karena pembangunan gedung Komisi Yudisial RI telah selesai sehingga pada tahun 2010 tidak dianggarkan belanja modal gedung dan bangunan. Namun demikian terjadi kenaikan pada belanja barang karena meningkatnya kegiatan operasional Komisi Yudisial RI. Belanja pegawai juga mengalami peningkatan karena adanya penambahan pegawai Komisi Yudisial RI. Untuk belanja modal, secara keseluruhan terjadi penurunan.

Rincian lebih lanjut realisasi belanja per jenis belanja dan program dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL RINCIAN REALISASI PER JENIS BELANJA TAHUN 2010 DAN 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2010	2009	
51	Belanja Pegawai	6.202.123.278,00	5.365.395.584,00	836.727.694
52	Belanja Barang	46.448.992.726,00	40.783.889.327,00	5.665.103.399
53	Belanja Modal	1.522.010.238,00	43.088.381.467,00	(41.566.371.229)
	JUMLAH	54.173.126.242,00	89.237.666.378,00	(35.064.540.136)

Realisasi belanja sebesar Rp54.173.126.242,00 tersebut digunakan untuk membiayai tiga program sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial RI tahun 2010. Rincian realisasi belanja berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL RINCIAN REALISASI PER PROGRAM TAHUN 2010 DAN 2009

dalam rupiah

NAMA PROGRAM	REALISASI BELANJA		KENAIKAN/ PENURUNAN
	2010	2009	
Penerapan Kepemerintahan yang Baik	42.764.769.240	33.978.790.891	8.785.978.349
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Ham	2.791.480.344	3.552.842.806	(761.362.462)
Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	8.616.876.658	51.706.032.681	(43.089.156.023)
JUMLAH	54.173.126.242	89.237.666.378	(35.064.540.136)

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Untuk tahun 2010, transaksi keuangan dari APBN yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI sebesar Rp58.473.572.000,00.

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
   Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca
   Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan
   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Terkait dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan, Komisi Yudisial RI masih menggunakan metode Basis Kas menuju Akrual sebagaimana diatur dalam Lampiran II.03 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian, dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Komisi Yudisial RI adalah :

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Komisi Yudisial RI mengakui pendapatan pada saat kas diterima oleh Kas Umum Negara. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
- Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara

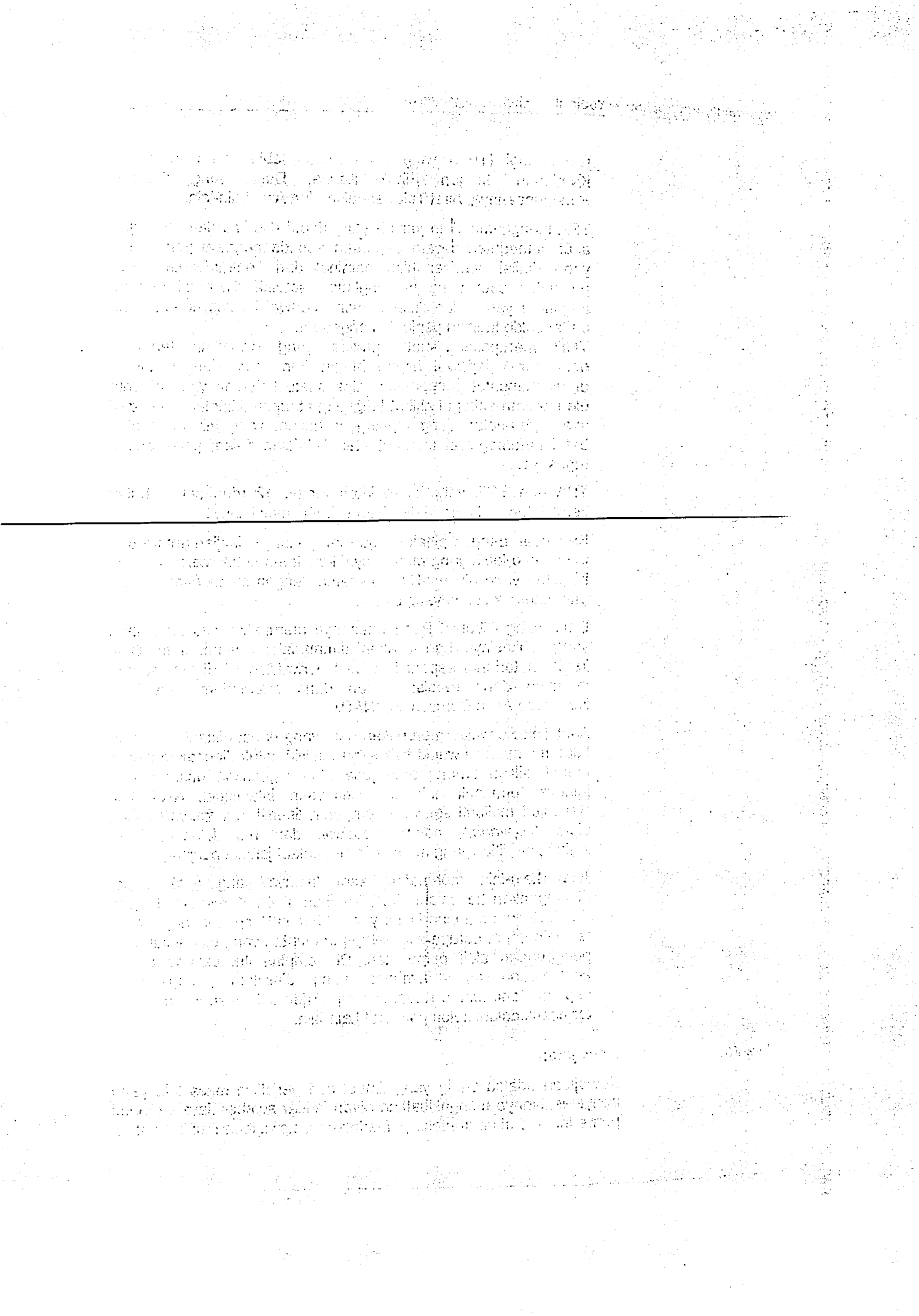

lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2010 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Dalam tahun anggaran 2010, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tidak menganggarkan pendapatan. Namun demikian, hingga 31 Desember 2010 realisasi pendapatan mencapai sebesar Rp211.131.399,00.

Selama Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI menerima anggaran belanja sebesar Rp58.473.572.000,00 untuk membiayai kegiatan Komisi Yudisial RI. Realisasi belanja bruto pada tahun 2010 adalah sebesar Rp54.176.486.902,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp3.360.660,00 sehingga realisasi belanja bersih sebesar Rp54.173.126.242,00 atau mencapai 92,65% dari total anggaran sebesar Rp58.473.572.000,00.

TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2010

dalam rupiah

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
A	**Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah**	**0**	**211.131.399**	**0**
A.1	Penerimaan Pajak	0	0	0
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	211.131.399	0
A.3	Penerimaan Hibah	0	0	0
B	**Realisasi Belanja Negara**	**58.473.572.000**	**54.173.126.242**	**92,65**
B.1	Belanja Rupiah Murni	**58.473.572.000**	**54.173.126.242**	**92,65**
B.1.1	Belanja Pegawai	6.283.934.000	6.202.123.278	98,70
B.1.2	Belanja Barang	50.614.888.000	46.448.992.726	91,77
B.1.3	Belanja Modal	1.574.750.000	1.522.010.238	96,65
B.2	Belanja Pinjaman Luar Negeri	0	0	0
B.3	Belanja Rupiah Pendamping	0	0	0
B.4	Belanja Hibah	0	0	0

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pendapatan Negara dan Hibah
Rp211.131.399,00

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Estimasi pendapatan Negara dan Hibah yang dialokasikan pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp0,00 (Nihil). Namun demikian, hingga per 31 Desember 2010 realisasi pendapatan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai sebesar Rp211.131.399,00 yaitu berupa pendapatan sewa gedung sebesar Rp58.788.000,00. Pengembalian belanja Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp147.157.892,00 pendapatan lain-lain sebesar Rp1.000.000,00 ditambah pendapatan penghapusan sebesar Rp400.000,00 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp3.785.507,00.

Grafik : Komposisi Realisasi PNBP

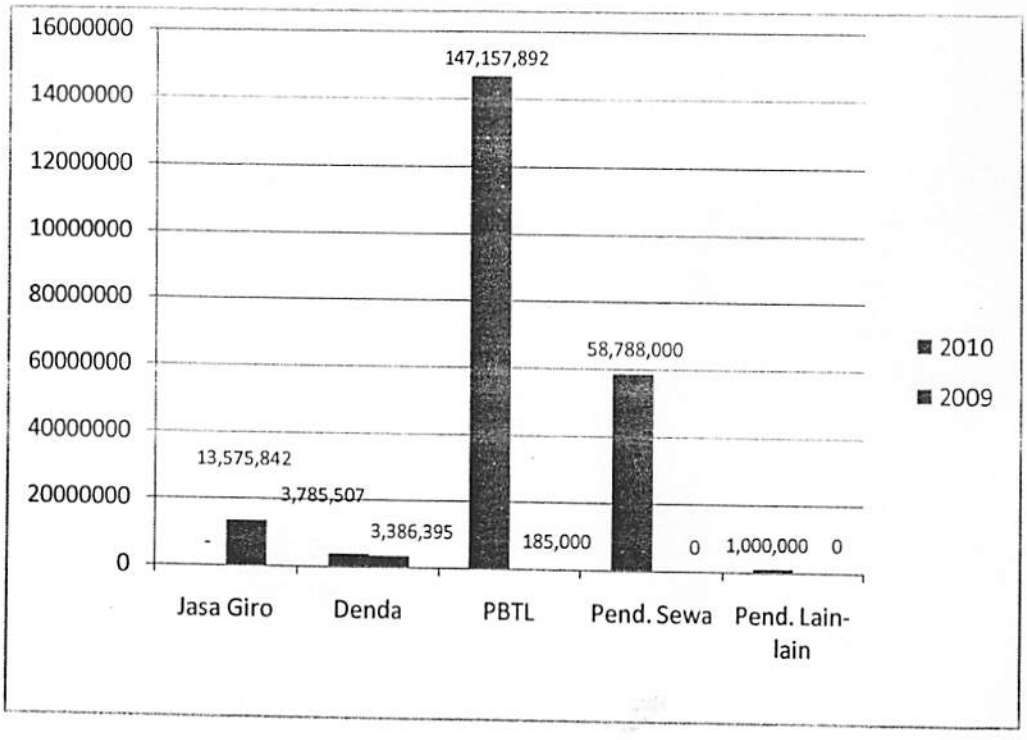

Realisasi PNBP
Rp211.131.399,00

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP tahun 2010 adalah sebesar Rp211.131.399,00 sedangkan realisasi PNBP tahun 2009 sebesar Rp17.147.237,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp193.984.162,00. Kenaikan tersebut berasal dari pendapatan dari Gedung Komisi Yudisial RI yang disewa oleh Bank Rakyat Indonesia dan pengembalian belanja tahun yang lalu mengalami kenaikan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

TABEL REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
TAHUN 2010 DAN 2009

dalam rupiah

NO.	URAIAN	REALISASI		KENAIKAN/ PENURUNAN
		2010	2009	
1	Jasa Giro	0	13.575.842	(13.575.842)
2	Denda	3.785.507	3,386,395	399.112
3	Pengembalian Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	147.157.892	185,000	146.972.892
4	Pendapatan Sewa	58.788.000	0	58.788.000
5	Pendapatan lain-lain	1.000.000	0	1.000.000
6.	Pendapatan Penghapusan	400.000	0	400.000
	JUMLAH	**211.131.399**	**17,147,237**	**193.984.162**

Realisasi Belanja Negara
Rp54.173.126.242,00

B.2.2. Belanja Negara

Belanja negara pada tahun 2010 seluruhnya berasal dari rupiah murni, dengan realisasi belanja bruto sebesar Rp54.176.486.902,00 sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp3.360.660,00 sehingga realisasi belanja bersih sebesar Rp54.173.126.242,00 atau mencapai 92,65% dari anggaran sebesar Rp58.473.572.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp89.237.666.378,00 terdapat penurunan sebesar Rp35.064.540.136,00 yang terjadi terutama karena penurunan belanja modal gedung yang sudah selesai pelaksanaan pembangunannya. Namun demikian terdapat peningkatan pada belanja barang untuk kegiatan operasional Komisi Yudisial RI dan belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai Komisi Yudisial RI.

TABEL REALISASI BELANJA NEGARA
TAHUN 2010 DAN 2009

dalam rupiah

No.	Uraian	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)
		2010	2009	
1.	Belanja Rupiah Murni	54.173.126.242	89.237.666.378	(35.064.540.136)
	1.1. Belanja Pegawai	6.202.123.278	5.365.395.584	836.727.694
	1.2. Belanja Barang	46.448.992.726	40.783.889.327	5.665.103.399
	1.3. Belanja Modal	1.522.010.238	43.088.381.467	(41.566.371.229)
2.	Belanja Pinjaman Luar Negeri	-	-	-
3.	Belanja Rupiah Pendamping	-	-	-
4.	Belanja Hibah	-	-	-

B.2.2.1. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Realisasi belanja tahun 2010 sebesar Rp54.173.126.242,00 atau 92,65% dari anggarannya. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini :

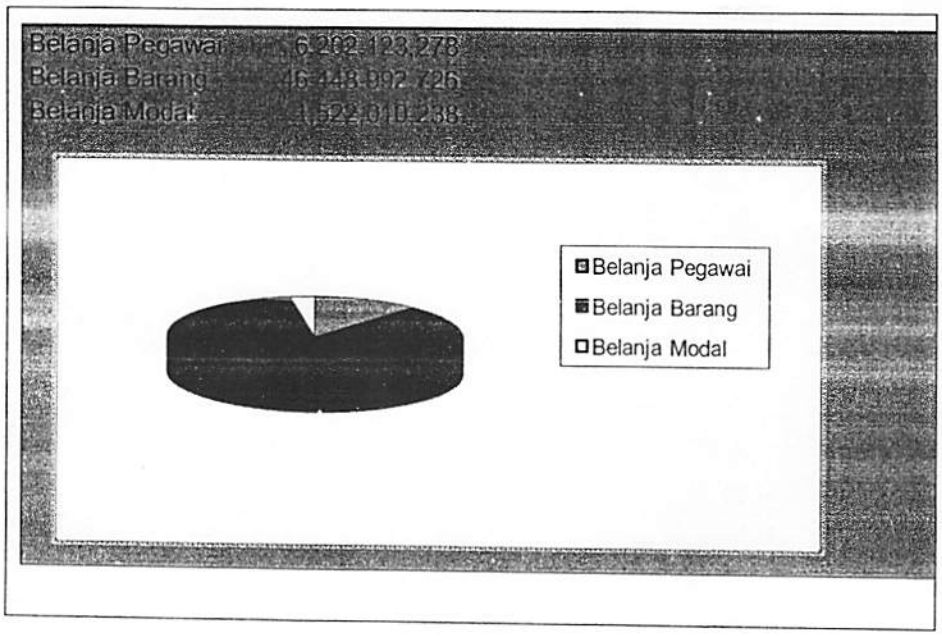

Grafik : Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2010

Jika dibandingkan tahun 2009 realisasi anggaran tersebut terdapat penurunan sebesar Rp35.064.540.136,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	Uraian Belanja	Realisasi		Kenaikan/ (Penurunan)
		2010	2009	
51	Belanja Pegawai	6.202.123.278	5.365.395.584	836.727.694
52	Belanja Barang	46.448.992.726	40.783.889.327	5.665.103.399
53	Belanja Modal	1.522.010.238	43.088.381.467	(41.566.371.229)
	Jumlah	54.173.126.242	89.237.666.378	(35.064.540.136)

Belanja Pegawai
Rp6.202.123.278,00

B.2.2.1.1. *Belanja Pegawai*

Dari total anggaran belanja pegawai tahun 2010 sebesar Rp6.283.934.000,00 realisasi belanja pegawai bruto sebesar Rp6.202.133.938,00 dan terdapat pengembalian belanja sebesar Rp10.660,00 sehingga realisasi belanja pegawai bersih sebesar Rp6.202.123.278,00 (98,70%). Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2009 sebesar Rp5.365.395.584,00 terjadi kenaikan sebesar Rp836.727.694,00. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan adanya penambahan CPNS dan PNS dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI sehingga belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja lembur bertambah. Dari realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp4.176.461.200,00 terdapat realisasi belanja uang makan PNS sebesar Rp562.215.000,00 atau 105,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp532.000.000,00. Hal tersebut terjadi karena direvisinya anggaran belanja uang makan sebesar Rp150.000.000,00 dari anggaran semula sebesar Rp682.000.000,00 guna mencukupi belanja Gaji Pokok PNS sehubungan dengan adanya penambahan pegawai.

Terkait penurunan terhadap belanja gaji dan tunjangan pejabat negara disebabkan pada akhir periode masa jabatan Anggota Komisi Yudisial RI (Desember 2010) sudah tidak menerima lagi tunjangan pejabat negara sehingga mengakibatkan penurunan realisasi dibanding tahun 2009 sebesar 2,84%. Penurunan realisasi juga terjadi pada belanja honorarium sebesar 9,63% dibandingkan tahun lalu, hal ini disebabkan sebagian besar pegawai tidak tetap telah menjadi CPNS sehingga tidak menerima honorarium, sedangkan belanja asuransi kesehatan pada tahun anggaran 2010 tidak dianggarkan.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	4.176.461.200	3.095.731.992	34,91
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.579.321.578	1.625.416.092	(2,84)
5121	Belanja Honorarium	342.550.000	379.044.500	(9,63)
5122	Belanja Lembur	103.790.500	62.847.000	65,15
5132	Belanja Asuransi Kesehatan	0	202.356.000	0,00
	JUMLAH	**6.202.123.278**	**5.365.395.584**	**15,59**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun secara keseluruhan terjadi kenaikan, namun tidak seluruh jenis belanja mengalami kenaikan. Kenaikan hanya terjadi pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan belanja lembur, sedangkan belanja lainnya mengalami penurunan.

Belanja Barang
Rp46.448.992.726,00

B.2.2.1.2. *Belanja Barang*

Dari total anggaran belanja barang tahun 2010 sebesar Rp50.614.888.000,00 realisasi belanja barang bruto sebesar Rp46.452.342.726,00 dan terdapat pengembalian belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.350.000,00 sehingga belanja barang bersih sebesar Rp46.448.992.726,00 (91,77%). Dibandingkan dengan realisasi belanja barang tahun 2009 sebesar Rp40.783.889.327,00 terjadi kenaikan sebesar Rp5.665.103.399,00 (13,89%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5211	Belanja Barang Operasional	15.848.471.396	2.592.525.242	511,31
5212	Belanja Barang Non Operasional	7.864.061.569	22.186.908.615	(64,56)
5221	Belanja Jasa	4.572.598.058	3.891.026.798	17,52
5231	Belanja Pemeliharaan	5.590.078.347	1.255.801.058	345,14
5241	Belanja Perjalanan dalam Negeri	12.573.783.356	10.857.627.614	15,81
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0
	Jumlah	**46.448.992.726**	**40.783.889.327**	**13,89**

Belanja barang operasional mengalami kenaikan sebesar 511,31%. Hal ini disebabkan peningkatan kegiatan terkait belanja keperluan perkantoran sebesar Rp87.556.448,00, belanja pengiriman surat dinas pos pusat sebesar Rp78.684.225,00, honor terkait operasional satuan kerja sebesar Rp87.090.000,00 dan belanja barang operasional lainnya sebesar Rp13.002.615.481,00 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Operasional
Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5211	Belanja Barang Operasional	15.848.471.396	2.592.525.242	511,31
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1.058.681.104	971.124.656	9,02
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	78.684.225	0	~
521115	Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	202.565.000	115.475.000	75,42
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	14.508.541.067	1.505.925.586	863,43

Belanja barang non operasional mengalami penurunan sebesar 64,56%. Hal ini disebabkan pada tahun 2010 Komisi Yudisial RI menetapkan kebijakan penghematan anggaran untuk belanja barang non operasional. Adapun belanja barang non operasional yang dimaksud adalah belanja bahan sebesar Rp1.658.464.608,00, honor terkait output kegiatan sebesar Rp1.114.165.000,00 dan belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp5.091.431.961,00 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5212	Belanja Barang Non Operasional	7.864.061.569	22.186.908.615	(64,56)
521211	Belanja Bahan	1.658.464.608	5.208.709.983	(68.16)
521213	Honor Terkait Output Kegiatan	1.114.165.000	1.087.750.000	2.43
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.091.431.961	15.890.448.632	(67.96)

Belanja jasa mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 17,52%. Hal ini antara lain disebabkan adanya peningkatan terkait belanja langganan daya dan jasa sebesar Rp747.891.438,00, belanja jasa konsultan sebesar Rp23.144.555,00, dan belanja jasa profesi sebesar Rp1.891.320.000,00 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Jasa Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5221	Belanja Jasa	4.572.598.058	3.891.026.798	17.52
522111	Belanja Langganan Daya dan Jasa	1.363.904.636	616.013.198	121.41
522113	Belanja Jasa Konsultan	134.584.555	111.440.000	20.77
522114	Belanja Sewa	752.238.867	2.733.023.600	(72.48)
522115	Belanja Jasa Profesi	2.321.870.000	430.550.000	439.28

Belanja pemeliharaan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 345,14%. Hal ini antara lain disebabkan pada tahun anggaran 2010 terdapat peningkatan belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp4.159.667.309,00 dan biaya pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp614.847.992,00. Total belanja pemeliharaan tahun anggaran 2010 sebesar Rp5.590.078.347,00 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5231	Belanja Pemeliharaan	5.590.078.347	1.255.801.058	345.14
523111	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.866.293.715	706.626.406	588.66
523119	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	108.936.640	549.174.652	19.84
523121	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	614.847.992	0	~

Pada tahun 2010 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp3.350.000,00 disebabkan adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas terkait kegiatan sosialisasi pengembangan SPIP pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI yang diselenggarakan di Bogor, sehingga mengurangi realisasi belanja perjalanan dinas dari semula Rp12.577.133.356,00 menjadi sebesar Rp12.573.783.356,00, dimana dalam jumlah tersebut sudah termasuk realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2009 yang dibebankan pada tahun 2010 sebesar Rp51.854.300,00. Namun demikian kondisi tersebut diatas tidak mempengaruhi kenaikan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 15,81% yang disebabkan adanya peningkatan volume kegiatan baik dalam bentuk workshop, lokakarya, maupun konsolidasi jejaring sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri
Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	12.573.783.356	10.857.627.614	15.81
524111	Belanja Perjalanan Biasa	12.573.783.356	10.857.627.614	15.81

Belanja Modal
Rp1.522.010.238,00

B.2.2.1.3. *Belanja Modal*

Dari total anggaran belanja modal tahun 2010 sebesar Rp1.574.750.000,00 terealisasi sebesar Rp1.522.010.238,00 (96,65%) dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2009 sebesar Rp43.088.381.467,00 terjadi penurunan sebesar Rp41.566.371.229,00 (96,47%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2010 dan 2009

dalam rupiah

KD	URAIAN BELANJA	REALISASI		% NAIK / (TURUN)
		2010	2009	
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.324.528.238	3.708.306.140	(64,28)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	39.305.589.552	0,00
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	197.482.000	74.485.775	165,13
	JUMLAH	**1.522.010.238**	**43.088.381.467**	**(96,47)**

Dari tabel tersebut terlihat bahwa penurunan realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2010 sebesar 96,47% terjadi terutama dari belanja modal gedung dan bangunan. Penurunan lainnya terjadi pula pada belanja modal peralatan dan mesin. Kenaikan hanya terjadi pada Belanja Modal Fisik lainnya yaitu berupa penambahan buku – buku perpustakaan.

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp2.383.777.902,00 (64,28%) dikarenakan pengadaan peralatan dan mesin berupa workstation, furniture dan perlengkapan sarana gedung kantor lainnya lebih banyak dilakukan pada periode sebelumnya.

Belanja modal gedung dan bangunan pada tahun 2010 tidak lagi dianggarkan karena pembangunan gedung kantor Komisi Yudisial RI telah selesai dilaksanakan pada tahun 2009.

Belanja modal fisik lainnya pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp122.996.225,00 (165,13%) dikarenakan terdapat penambahan pengadaan buku-buku perpustakaan.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Dalam rangka membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2009 Komisi Yudisial RI bekerjasama dengan berbagai lembaga penyedia dana dan menerima bantuan berupa kegiatan atau barang dari lembaga donor, pengelolaan dana dilakukan sendiri oleh penyedia dana. Lembaga-lembaga donor yang menyerahkan bantuan hibah meliputi:

a. Bantuan dari NLRP (*National Legal Reform Program*) sebesar Rp793.000.000,00 yang dilaksanakan oleh ILR (*Indonesian Legal Rondtable*) untuk penyusunan Cetak Biru Komisi Yudisial RI. Jumlah tersebut merupakan bagian dari hibah yang diberikan Pemerintah Belanda

kepada pemerintah Indonesia melalui Bappenas senilai US$6,291,445.

b. Bantuan dari UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) berupa kegiatan pembentukan tiga posko pengaduan masyarakat di tiga kota yaitu Mataram, Samarinda dan Medan senilai Rp131.071.050,00 dan satu unit server senilai US$24,605 atau setara Rp230.007.540,00 yang diserahterimakan ke Komisi Yudisial RI pada tanggal 16 November 2009.

c. Bantuan dari NCHR (*Norwegian Center for Human Right*) sebesar Rp535.537.050,00 untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan para hakim yang penggunaan dananya dikelola oleh PUSHAM Universitas Islam Indonesia

Pemberian hibah tersebut menjadi temuan BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2009 dan sudah selesai ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial RI pada bulan Maret 2011.

Pada Tahun Anggaran 2010 Komisi Yudisial RI tidak menerima dan tidak mengelola hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dari lembaga donor. Komisi Yudisial RI hanya mengarahkan apabila apabila ada lembaga donor yang akan memberi bantuan hibah agar memberikan langsung kepada mitra kerja atau jejaring Komisi Yudisial RI.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan *ekuitas* dana pada tanggal 31 Desember 2010.

Komposisi neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset	148.594.978.005	146.340.157.486	2.254.820.519
Kewajiban	73.787.464	532.283.451	(458.495.987)
Ekuitas Dana	148.521.190.541	145.807.874.035	2.713.316.506

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp148.594.978.005,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.089.524.519,00, Aset Tetap sebesar Rp146.205.251.886,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp1.300.201.600,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp73.787.464,00, yaitu berupa kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp63.430.625,00, pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 9.798.000,00 dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp558.839,00.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp148.521.190.541,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.015.737.055,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp147.505.453.486,00.

Grafik komposisi neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tersebut terlihat sebagai berikut:

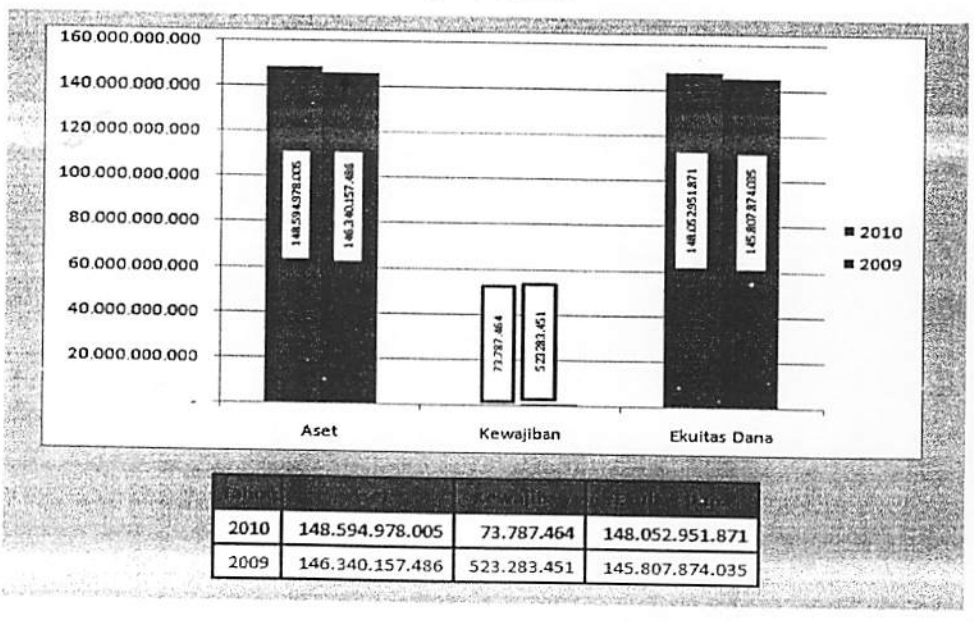

2010	148.594.978.005	73.787.464	148.052.951.871
2009	146.340.157.486	523.283.451	145.807.874.035

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Dana Uang Persediaan (UP) yang bersifat berdaur ulang sebesar Rp740.000.000,00 dengan realisasi/penggantian selama tahun 2010 sebesar Rp8.868.087.365,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Uang Persediaan Tahun 2010

dalam rupiah

No.	Bulan	Realisasi/ Penggantian
1	Januari	739,289,545
2	April	739,810,692
3	April	739,966,700
4	Mei	739,246,587
5	Juni	739,879,914
6	Agustus	739,247,834
7	Agustus	739,145,075
8	September	739,923,580
9	Oktober	739,681,222
10	Oktober	739,610,928
11	November	739,786,640
12	November	732,498,648
Jumlah		**8,868,087,365**

Oleh karena bulan Desember 2010 realisasi penggunaan uang persediaan sebesar Rp732.498.648,00, maka pada akhir tahun 2010 terdapat sisa uang persediaan sebesar Rp7.501.352,00.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelola Bendahara Pengeluaran sebesar Rp21.458.559.000,00. Semua dana tersebut seluruhnya telah dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp19.843.463.165,00 sehingga terdapat sisa TUP sebesar Rp1.615.095.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Tambahan Uang Persediaan Tahun 2010

dalam rupiah

No.	No. SPM TUP	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Setor (Rp)	Tanggal Penyetoran
1.	0008/KYRI /2010	1.103.416.000	1.102.646.675	769.325	12 Februari 2010
2.	0055/KYRI /2010	2.617.018.000	2.616.230.355	787.645	23 Maret 2010
3.	0095/KYRI /2010	200.000.000	199.994.900	5.100	29 Maret 2010
4.	0104/KYRI /2010	2.402.800.000	2.402.750.956	49.044	7 Mei 2010
5.	0168/KYRI /2010	2.579.635.000	2.579.528.437	106.563	14 Juni 2010
6.	0255/KYRI /2010	2.212.945.000	2.212.773.994	171.006	26 Juli 2010
7.	0326/KYRI /2010	2.262.150.000	2.261.696.472	453.528	2 September 2010
8.	0447/KYRI /2010	2.127.550.000	2.127.295.024	254.976	3 November 2010
9.	0546/KYRI /2010	5.953.045.000	4.340.546.352	1.612.498.648	29 Desember 2010
Jumlah		**21.458.559.000**	**19.843.463.165**	**1.615.095.835**	

Dari sisa TUP sebesar Rp1.615.095.835,00 tersebut hingga bulan November 2010 telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp2.597.187,00 sehingga pada akhir Desember 2010 terdapat kelebihan TUP sebesar Rp1.612.498.648,00. Selanjutnya sisa dana UP sebesar Rp7.501.352,00 dan sisa TUP sebesar Rp1.612.498.648,00 dengan nilai total Rp1.620.000.000,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 29 Desember 2010.

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp558.839,00

C.2.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo kas lainnya dan setara kas pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
558.839	16.107.892	(15.549.053)

Jumlah tersebut berasal dari Dana Operasional Pimpinan (DOP) yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.200.000.000,00 dan digunakan dalam rangka memperlancar tugas pimpinan Komisi Yudisial RI sebesar Rp1.199.441.161,00 sehingga masih terdapat saldo kas sebesar Rp558.839,00. Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara pada tanggal 03 Januari 2011.

Persediaan Rp1.088.965.680,00

C.2.1.3 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang tersebut akan dimanfaatkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah persediaan berdasarkan inventarisasi per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.1.088.965.680,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 420.778.188,00 jika dibandingkan dengan saldo per tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp.668.187.492,00, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
1.088.965.680	668.187.492	420.778.188

Tabel Persediaan per 31 Desember 2010

dalam rupiah

Kode Akun	Uraian	Jumlah
115111	Barang konsumsi	195.627.982
115113	Bahan untuk pemeliharaan	28.096.240
115114	Suku cadang	68.607.317
11512	Persediaan Ke Masyarakat	726.896.150
115199	Persediaan lainnya	69.737.991
	Jumlah	**1.088.965.680**

Aset Tetap Rp146.205.251.886,00

C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp146.205.251.886,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.738.466.384,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2009, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31-12-2010	Per 31-12-2009	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Tanah	47.188.389.400	47.188.389.400	0
2	Gedung dan Bangunan	68.674.690.857	68.335.915.562	338.775.295
3	Peralatan & Mesin	26.363.320.178	25.161.111.089	1.202.209.089
4	Jaringan	3.421.134.028	3.421.134.028	0
5	Aset Tetap lainnya	557.717.423	360.235.423	197.482.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	**146.205.251.886**	**144.466.785.502**	**1.738.466.384**

Grafik komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 tersebut terlihat sebagai berikut:

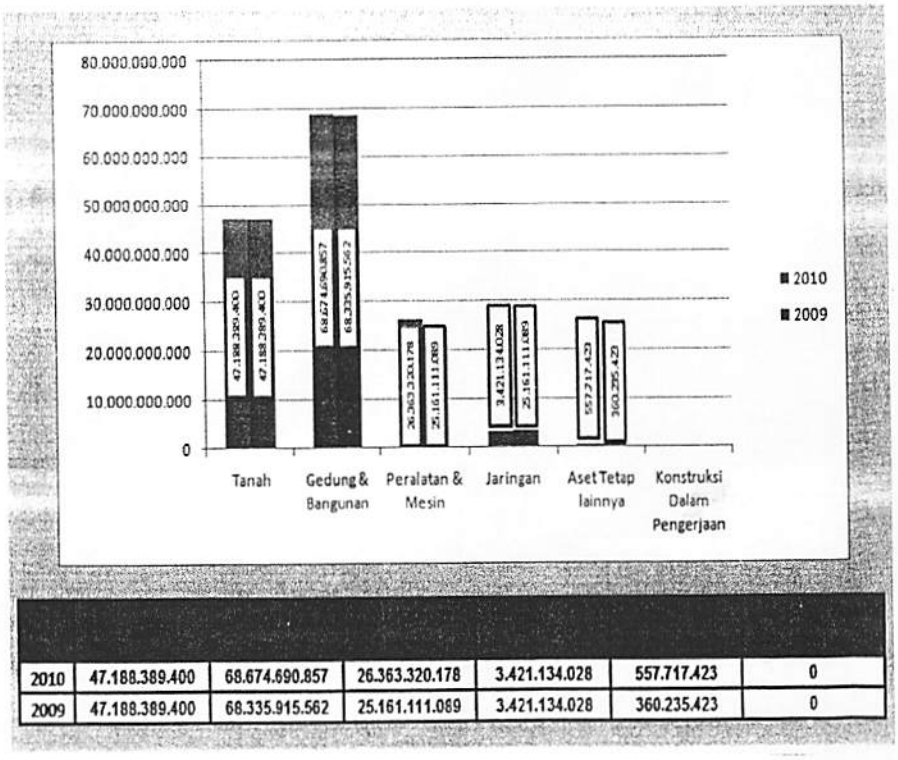

2010	47.188.389.400	68.674.690.857	26.363.320.178	3.421.134.028	557.717.423	0
2009	47.188.389.400	68.335.915.562	25.161.111.089	3.421.134.028	360.235.423	0

Pada tahun 2009 pembangunan gedung kantor Komisi Yudisial RI telah selesai dilaksanakan dengan nilai pembangunan sebesar Rp84.080.261.905,00. Dari nilai tersebut dilakukan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp68.335.915.562,00 sedangkan sisanya direklasifikasi ke peralatan dan mesin sebesar Rp12.323.212.315,00, dan jaringan sebesar Rp3.421.134.028,00.

Pada tahun 2010 terjadi penambahan pemasangan partisi dan sun blast sebesar Rp338.775.295,00 sehingga nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp68.674.690.857,00.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.202.209.089,00 berasal dari pengadaan peralatan kantor seperti alat angkutan kenadaraan tak bermotor, alat kantor, alat rumah tangga , alat studio, alat komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, alat laboratorium lingkungan hidup, komputer unit, peralatan komputer, alat pelindung, dan alat SAR serta penghapusan beberapa peralatan kantor sepert alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, komputer unit, dan peralatan komputer.

Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp197.482.000,00 berupa pengadaan buku – buku untuk perpustakaan Komisi Yudisial RI.

Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN Tahun 2010

dalam rupiah

No.	Uraian	Aset Tetap Dalam Neraca	Aset Tetap Dalam SIMAK BMN	Selisih
1.	Tanah	47.188.389.400	47.188.389.400	0
2.	Peralatan dan Mesin	26.363.320.178	26.558.196.528	194.876.350
3.	Gedung dan Bangunan	68.674.690.857	68.674.690.857	0
4.	Jaringan	3.421.134.028	3.421.134.028	0
5.	Aset Tetap Lainnya	557.717.423	557.717.423	0

Selisih sebesar Rp194.876.350,00 adalah nilai peralatan dan mesin ekstrakomtable per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tanah Rp47.188.389.400,00

C.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp47.188.389.400,00 merupakan biaya perolehan pengadaan tanah yang terdiri dari harga tanah sebesar Rp46.991.400.000,00 dengan luas 5.780 m^2 dan biaya pengadaan sebesar Rp196.989.400,00 yang seluruhnya dilakukan dalam tahun 2007.

Tabel Perbandingan Tanah
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
47.188.389.400	47.188.389.400	0

Gedung dan Bangunan Rp.68.674.690.857,00

C.2.2.2 Gedung dan Bangunan

Pembangunan Gedung Kantor Komisi Yudisial dimulai tahun 2008 dan diselesaikan pada tahun 2009. Jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp84.080.261.905,00 yang berasal dari tahun 2008 sebesar Rp44.774.672.353, dan tahun 2009 sebesar Rp39.305.589.552,00.

Dari jumlah nilai pembangunan gedung tersebut sebagian dilakukan reklasifikasi ke jenis aset lainnya, yaitu jaringan dan peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp15.744.346.343,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.323.212.315,00 dan
b. Jaringan sebesar Rp 3.421.134.028,00.

Dengan demikian, maka nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 menjadi sebesar Rp 68.335.915.562,00. Pada tahun 2010 terdapat penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari MAK 52 yaitu dari pemasangan partisi dan sun blast sebesar Rp338.775.295,00. Sehingga nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2010 menjadi sebesar Rp 68.674.690.857,00.

Tabel Perbandingan Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
68.674.690.857	68.335.915.562	338.775.295

Peralatan dan Mesin Rp26.363.320.178,00

C.2.2.3 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 sebesar Rp26.363.320.178,00. Jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp25.161.111.089,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp1.202.209.089,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel Perbandingan Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
26.363.320.178	25.161.111.089	1.202.209.089

Kenaikan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.202.209.089,00 tersebut adalah sebagai berikut :

dalam rupiah

Penambahan :	
Saldo Awal	25.161.111.089
Pembelian	**1.296.964.389**
Transfer Masuk	-
Pengembangan	-
Reklasifikasi Masuk	-
	26.458.075.478
Pengurangan:	
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Nilai (Penghapusan)	**94.755.300**
	94.755.300
Jumlah	**26.363.320.178**

Dalam penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.202.209.089,00 terdiri dari pembelian sebesar Rp1.296.964.389,00 yang dilakukan pada tahun 2010 yaitu pengadaan peralatan kantor baik dengan menggunakan belanja modal MA 53 sebesar Rp1.260.935.389,00 maupun dengan belanja barang MA 52 sebesar Rp36.029.000,00 serta pengurangan sebesar Rp94.755.300,00 berasal dari penghapusan peralatan dan mesin.

Penghapusan peralatan dan mesin tahun 2010 sebesar Rp94.755.300 terdiri dari penghapusan peralatan kantor sebesar Rp8.764.220,00, peralatan rumah tangga sebesar Rp2.739.880,00, peralatan komunikasi sebesar Rp4.200.000,00, komputer unit sebesar Rp75.100.000,00 dan peralatan komputer sebesar Rp3.951.200,00.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2010

dalam rupiah

MA	Uraian	Jumlah
131311-2.02.02	Alat Angkutan Tak Bermotor	2,025,000
131311-2.05.01	Alat Kantor	87,161,200
131311-2.05.02	Alat Rumah Tangga	455,442,050
131311-2.06.01	Alat Studio	101,870,966
131311-2.06.02	Alat Komunikasi	3,685,000
131311-2.07.01	Alat Kedokteran	4,575,000
131311-2.08.01	Unit Alat Laboratorium	575,000
131311-2.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2,075,898
131311-2.12.01	Komputer Unit	500,758,700
131311-2.12.02	Peralatan Komputer	102,766,575
Jumlah		**1,260,935,389**

Penambahan yang berasal dari belanja modal tidak sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu:

dalam rupiah

Keterangan	Jumlah
Penambahan Peralatan dan Mesin terkait BM Peralatan dan Mesin	
Pembelian	1,324,528,238
Ekstrakomptabel	(63,592,849)
Jumlah	**1,260,935,389**
Penambahan Peralatan dan Mesin tidak terkait BM	
Pembelian dengan Belanja Bahan	36,029,000
Jumlah	**36,029,000**
Total	**1,296,964,389**

Jaringan Rp3.421.134.028,00

C.2.2.4 Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.421.134.028.00. Jumlah tersebut berasal dari reklasifikasi pembangunan gedung yang telah diselesaikan pembangunannya pada tahun 2009.

Tabel Perbandingan Jaringan
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
3.421.134.028	3.421.134.028	0

Aset Tetap Lainnya Rp557.717.423,00

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp557.717.423,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp197.482.000,00 jika dibandingkan dengan nilai asset per 31 Desember 2009 sebesar Rp360.235.423,00. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya penambahan pengadaan Buku Perpustakaan Komisi Yudisial RI yang dibebankan pada belanja modal fisik lainnya (MAK 536111).

Tabel Perbandingan Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
557.717.423	360.235.423	197.482.000

Aset Lainnya Rp1.300.201.600,00

C.2.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar dan aset tetap pada tanggal neraca.

Tabel Perbandingan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
1.300.201.600	1.189.076.600	111.125.000

Saldo awal aset lainnya per 31 Desember 2009 Rp1.189.076.600 terdiri dari :

1) Rp503.626.600,00, berupa hak cipta senilai Rp79.755.500,00 dan sistem aplikasi komputer senilai Rp423.871.100,00;
2) Modul aplikasi internet sebesar Rp78.250.000,00;
3) Modul aplikasi disposisi elektronik sebesar Rp78.250.000,00;
4) Sistem informasi track record hakim berbasis web sebesar Rp92.250.000,00;
5) Sistem informasi kepegawaian sebesar Rp92.250.000,00;
6) Modul aplikasi jejaring sebesar Rp68.700.000,00;
7) Sistem informasi layanan pengaduan online sebesar Rp87.750.000,00;
8) Modul aplikasi penanganan pengaduan sebesar Rp73.700.000,00;
9) Sistem informasi perpustakaan sebesar Rp74.300.000,00;
10) Sistem perencanaan strategis teknologi informasi sebesar Rp40.000.000,00.

Aset Lainnya per 31 Desember 2010 berupa Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.300.201.600,00.

Kenaikan nilai aset lainnya per tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp111.125.000,00 berasal dari pengadaan aplikasi Manajemen TOR RAB Rp48.700.000,00, Sistem Pembukuan Bendahara Rp27.500.000,00 dan Sistem Informasi Keuangan Rp34.925.000,00. Pengadaan aplikasi tersebut menggunakan belanja barang yaitu :

dalam rupiah

Keterangan	Jumlah
Penambahan Aplikasi terkait BM Aset lainnya	
Pembelian	-
Pengembangan	-
Jumlah	-
Penambahan Aplikasi tidak terkait BM Aset Lainnya	
Pembelian dengan Belanja Bahan	111.125.000
Jumlah	**111.125.000**
Total	**111.125.000**

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Uang Muka Kerja Rp0,00

C.2.4.1 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp0,00 (nihil) karena dana Uang Muka dari KPPN seluruhnya telah dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran 2010.

Hutang Kepada Pegawai Rp63.430.625,00

C.2.4.2 Hutang Kepada Pihak Ketiga

Hutang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2010 sebesar Rp63.430.625,00 berupa pembayaran uang makan pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Bulan Desember 2010 sebesar Rp45.740.000,00 dan pembayaran kekurangan gaji sebesar Rp17.690.625,00 yang baru akan dibayarkan pada bulan Januari 2011.

Jumlah tersebut menurun sebesar Rp452.744.934,00 dibandingkan hutang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2009 sebesar Rp516.175.559,00 yang digunakan untuk membayar Honor Tenaga Ahli, Gaji CPNS, UPP/S, Tunjangan Jabatan PNS, Uang Makan, Tagihan Listrik, Telepon dan Air yang belum dibayarkan dalam tahun anggaran sebelumnya.

Tabel Perbandingan Hutang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
63.430.625	516.175.559	(452.744.934)

Pendapatan diterima dimuka Rp9.789.000,00

C.2.4.3 Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.9.798.000,00. Jumlah tersebut merupakan pemabayaran sewa gedung dari Bank BRI untuk bulan Januari dan Februari 2011 yang telah diterima pada tahun 2010.

Pendapatan diterima dimuka mengalami kenaikan dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2009 karena Komisi Yudisial belum menyewakan tempat kepada pihak ketiga pada periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
9.798.000	0	9.798.000

Pendapatan yang ditangguhkan Rp558.839,00

C.2.4.4 Pendapatan yang ditangguhkan

Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2010 sebesar Rp558.839,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.549.053,00 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar Rp16.107.892,00. Dana ini merupakan sisa Dana Operasional Pimpinan yang sengaja disisakan untuk persiapan seandainya ada keperluan yang tidak terduga/mendadak. Sisa dana ini sudah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 3 Januari 2011.

Tabel Perbandingan Pendapatan yang Ditangguhkan
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
558.839	16.107.892	(15.549.053)

Ekuitas Dana Lancar Rp1.015.737.055,00

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/jangka pendek.

Nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1.015.737.055,00 Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp863.725.122,00 jika dibandingkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp152.011.933,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Lancar
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31-12-2010	Per 31-12-2009	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	Cadangan Persediaan	1.088.965.680	668.187.492	420.778.188
2.	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(63.430.625)	(516.175.559)	452.744.934
3.	Barang/Jasa yang harus diserahkan	(9.798.000)	-	(9.798.000)
	Jumlah	**1.015.737.055**	**152.011.933**	**863.725.122**

Cadangan Persediaan Rp 1.088.965.680,00

C.2.5.1 Cadangan Persediaan

Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.088.965.680,00 mengalami kenaikan sebesar Rp420.778.188,00 dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp668.187.492,00. Hal ini dikarenakan adanya barang persediaan berupa barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, dan obat-obatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan Cadangan Persediaan
Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

No.	Uraian	Per 31/12/2010	Per 31-12-2009	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Barang konsumsi	195.627.982	220.568.146	(24.940.164)
2	Bahan untuk pemeliharaan	28.096.240	18.275.315	9.820.925
3	Suku cadang	68.607.317	84.308.950	(15.701.633)
4	Persediaan Ke Masyarakat	726.896.150	253.113.940	473.782.210
5	Persediaan lainnya	69.737.991	91.921.141	(22.183.150)
	Jumlah	**1.088.965.680**	**668.187.492**	**420.778.188**

Dana yang harus disediakan untuk membayar hutang pada pihak ketiga Rp63.430.625,00

C.2.5.2 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp63.430.625,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp452.744.934 dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp516.175.559,00. Dana tersebut disediakan untuk membayar hutang kepada pegawai Komisi Yudisial RI untuk bulan Desember 2010. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Hutang Kepada Pihak Ketiga.

Tabel Perbandingan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
63.430.625	516.175.559	(452.744.934)

Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan Rp9.798.000,00

C.2.5.3 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp9.798.000,00 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.798.000,00 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan jasa sewa gedung yang masih harus diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) sampai dengan bulan Februari 2011.

Ekuitas Dana Investasi Rp147.505.453.486,00

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2010 sebesar Rp147.505.453.486,00 yang terdiri dari :

1) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp146.205.251.886,00
2) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp1.300.201.600,00

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.849.591.384,00 dibandingkan dengan jumlah periode sebelumnya.

Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Investasi Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
147.505.453.486	145.655.862.102	1.849.591.384

C.2.6.1 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp146.205.251.886,00, terdiri dari:
1) Tanah sebesar Rp47.188.389.400,00;
2) Gedung dan Bangunan sebesar Rp68.674.690.857,00;
3) Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.363.320.178,00;
4) Jaringan sebesar Rp3.421.134.028,00 ; dan
5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp557.717.423,00.

Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
146.205.251.886	144.466.785.502	1.738.466.384

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp146.205.251.886,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.738.466.384.188,00 dibandingkan periode sebelumnya. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Tetap.

C.2.6.2 Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Dana yang diinvestasikan dalam Asset Lainya sebesar Rp1.300.201.600,00 berupa hak cipta, software dan sistem aplikasi komputer.

Tabel Perbandingan Ekuitas Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Per 31 Desember 2010 dan 2009

dalam rupiah

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan/ (Penurunan)
1.300.201.600	1.189.076.600	111.125.000

Nilai Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.300.201.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp111.125.000,00 dibandingkan periode sebelumnya. Perkiraan ini merupakan penyeimbang akun Aset Lainnya.

Catatan Penting Lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Pada tahun anggaran 2010 Komisi Yudisial RI menggunakan Belanja Barang dan memanfaatkan sisa anggaran Belanja Pemeliharaan untuk pembelian sistem aplikasi senilai Rp111.125.000,00, pembuatan partisi

gedung senilai Rp338.775.295,00 dan pengadaan peralatan dan mesin senilai Rp36.029.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pembelian Sistem Aplikasi

dalam rupiah

Uraian	Nilai
Manajemen TOR dan RAB	48.700.000
Sistem Pembukuan Bendahara	27.500.000
Sistem Informasi Keuangan	34.925.000
Jumlah	**111.125.000**

Tabel Pemasangan Partisi Gedung

dalam rupiah

Uraian	Nilai
Pemasangan partisi, kaca dan gypsum	22.852.225
Pembuatan partisi lantai 5 di Ruang Wakil Ketua	13.500.000
Pemasangan kaca film sandblast dan pembuatan pintu lantai 3	20.099.223
Pemasangan kaca film sandblast Gedung Komisi Yudisial RI	49.844.197
Pembuatan partisi ruang lobby lantai dasar	93.750.000
Pembuatan partisi pintu acrylic dan neon box	31.500.000
Pemasangan partisi, kaca dan gypsum	14.961.650
Pembuatan partisi di Ruang Publik lantai 1 Gedung Komisi Yudisial RI	92.268.000
Jumlah	**338.775.295**

Tabel Pengadaan Peralatan dan Mesin

dalam rupiah

Uraian	Nilai
Pemasangan horizontal blind	19.629.000
Pengadaan bahan baku perawatan gedung Komisi Yudisial RI (peralatan body harness)	16.400.000
Jumlah	**36.029.000**

Terhadap pengadaan dengan menggunakan belanja barang tersebut diatas telah dilakukan kapitalisasi dengan menggunakan mekanisme jurnal koreksi.

Pengungkapan Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terdapat delapan temuan pemeriksaan. Atas temuan tersebut Komisi Yudisial RI telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI antara bulan Mei 2010 sampai dengan akhir Maret 2011 dengan rincian sebagai berikut:

D.1.1 Atas Sistem Pengendalian Intern Komisi Yudisial

Sesuai hasil laporan pemeriksaan Nomor : 58A/HP/XVI/04/2010 tanggal 28 April 2010 terdapat tiga temuan yaitu:

1. Kebijakan Pemberian uang Insentif Tenaga Ahli di Lingkungan Komisi Yudisial tahun 2009 sebesar Rp83.000.000,00 tidak memiliki dasar yang jelas.
2. Pengelolaan Persediaan pada Komisi Yudisial belum sepenuhnya sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) pengelolaan Persediaan yang diberlakukan pada Komisi Yudisial .
3. Pengadaan Building Automation System (BAS) dan Circuit Close Television (CCTV) pada Komisi Yudisial sebesar Rp1.139.150.000,00 belum dimanfaatkan .

Atas ketiga temuan tersebut Komisi Yudisial RI telah menindaklanjuti keseluruhannya berupa:

1. Mulai 01 Juli 2010 pemberian uang insentif untuk Tenaga Ahli sudah dihentikan
2. Telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor: 02/SE/SET.KY/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 Tentang Pengelolaan Barang Persediaan yang ditujukan kepada para Kepala Biro/Pusat agar dalam mengelola persediaan sepenuhnya mengacu pada SOP pengelolaan persediaan.
3. Kepala Biro Umum telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprint-01/BU.KY/V/2010 Tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Pengawas Operator BAS dan CCTV dan telah ditunjuk petugas definitif untuk mengoperasikan BAS dan CCTV tersebut serta telah dikeluarkan Surat Edaran Kepala Biro Umum Nomor 38/ND/BU.KY/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Pengoperasian BAS Kantor Komisi Yudisial RI.

D.1.2 Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Komisi Yudisial

Sesuai hasil laporan pemeriksaan Nomor : 58B/HP/XVI/04/2010 tanggal

28 April 2010 terdapat lima temuan yaitu:

1. Komisi Yudisial tidak melaporkan Pendapatan Hibah tahun 2009 kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebesar Rp1.689.620.000,00 dan mengunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN.
2. Penyetoran pendapatan atas Jasa Giro pada Rekening Koran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2009 ke Kas Negara sebesar Rp13.580.000,00 tidak tepat waktu.
3. Terdapat belanja barang tahun 2009 yang digunakan untuk belanja barang pada tahun 2010 sebesar Rp16.110.000,00 dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pekerjaan Penelitian Putusan Hakim sebesar Rp32.510.000,00 kepada Universitas Padjajaran tidak efektif.
5. Terdapat kehilangan Barang Inventaris Furniture hasil pengadaan tahun 2009 senilai Rp10.700.000,00.

Atas kelima temuan tersebut Komisi Yudisial RI telah menindaklanjuti keseluruhannya berupa:

1. Terhadap hibah yang diterima Komisi Yudisial RI tahun 2009, Komisi Yudisial telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga donor dan telah melengkapi dokumen sumber hibah sebagaimana telah dipersyaratkan dalam modul sistem akuntansi hibah sehingga penerimaan hibah dapat diproses oleh DJPU dalam menerbitkan register hibah;
2. Telah diberikan Surat Teguran kepada Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial Nomor : 618/SET.KY/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 terkait ketidakcermatannya dalam keterlambatan penyetoran Penerimaan Jasa Giro Tahun 2009;
3. Kami telah melakukan penyusunan SOP Penggunaan DOP dan telah kami setorkan ke kas negara dana sebesar Rp16.107.892,00 per 28 April 2010 dengan SSBP Nomor 03/439479/04/2010 dan telah diberikan Surat Teguran Nomor : 619/SET.KY/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk masa jabatan tahun 2009;
4. Telah diberikan Surat Teguran kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 620/SET.KY/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, Pejabat Pengadaan pada PPK Biro Seleksi dan Penghargaan Nomor : 621/SET.KY/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010, dan Bendahara Pengeluaran Nomor : 618/SET.KY/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 terkait kelalaiannya dalam melakukan pembayaran pekerjaan Penelitian Putusan Hakim
5. Telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara melalui SK Sekretaris Jenderal Nomor 081/KEP/SET.KY/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 dan memproses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas hilangnya barang inventaris (*furniture*) tersebut. Selanjutnya terhadap proses TGR, telah dikeluarkan SK Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 097/KEP/SET.KY/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pembebasan Kerugian Negara Terhadap Kehilangan Barang Inventaris Kantor. Kami juga telah mengirimkan Surat Permohonan Penghapusan Barang Inventaris kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Kementerian Keuangan Nomor 142/BU.KY/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II surat nomor S-

31/MK.06/WKN.07/KNL.02/2010 tanggal 03 November 2010 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara.

D.2 REKENING PEMERINTAH

Dalam tahun 2010 tidak ada rekening Komisi Yudisial yang ditutup. Rekening yang dimiliki tetap dipertahankan. Daftar Monitoring Penutupan Rekening Komisi Yudisial Tahun 2010 dan Daftar Rekening Komisi Yudisial Tahun 2010 sebagaimana terlampir.

Komisi Yudisial hanya mengelola satu rekening berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I tanggal 31 Juli 2007 No.S-104/WPB.11/PK.01/2007 atas nama Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial RI di BRI Cabang Veteran Jakarta dengan No. Rekening 0329.01.001773.30.7.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Transaksi pendapatan akrual berasal dari pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp9.798.000,00. Jumlah tersebut berasal dari perjanjian sewa ruang kantor gedung milik Komisi Yudisial RI antara Komisi Yudisial RI dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : PERJ-01.SET.KY/03/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang menunjukan bahwa BRI menyewa gedung Komisi Yudisial RI seluas 32 m^2 untuk kantor BRI dan 6 m^2 untuk ATM dengan periode 1 Maret 2010 sampai dengan 28 Februari 2011 dengan nilai sewa sebesar Rp58.788.000,00 dan sudah dibayarkan seluruhnya oleh BRI pada tanggal 2 Juli 2010. Dengan demikian terdapat pembayaran sewa untuk tahun 2011 selama dua bulan yang telah diterima oleh Komisi Yudisial RI pada tahun 2010 sebesar Rp9.798.000,00.

Sedangkan transaksi belanja secara akrual terdiri dari:

1. Adanya belanja tahun 2009 yang dibayarkan pada tahun 2010 sebesar Rp568.029.859,00 yaitu Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Struktural, Belanja Tunjangan PPh, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, Belanja Uang Honor Tetap, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Langganan Daya dan Jasa dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2009 yang dibebankan pada tahun 2010.
2. Adanya belanja tahun 2010 yaitu pembayaran kekurangan gaji Pegawai Komisi Yudisial untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2010 yang dibayarkan pada tahun 2011 senilai Rp17.690.625,00 yaitu Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan PPh, dan Belanja Tunjangan Beras PNS serta pembayaran uang makan senilai Rp45.740.000,00.

Informasi Pendapatan dan belanja secara akrual sebagaimana terlampir.

D.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

D.4.1 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara konstitutif Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan, yaitu pertama mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kedua mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal 24B UUD 1945.

Komisi Yudisial RI memulai operasionalnya bulan Agustus 2005. Biaya operasional bulan Agustus sampai dengan Desember 2005 menggunakan anggaran Mahkamah Konstitusi RI. Anggaran Komisi Yudisial baru dialokasikan dalam DIPA tersendiri mulai tahun 2006 pada Bagian Anggaran 100.

D.4.2 Ketentuan Perundang-Undangan

Ketentuan yang menjadi landasan kegiatan operasional Komisi Yudisial selain pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah:

1. UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
2. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan No.02/SKB.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; dan
6. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D.4.3 Komisioner (Anggota Komisi Yudisial)

Pada Tahun 2010 terjadi pergantian Komisioner dari periode pertama (2006-2010) ke Komisioner periode kedua (2010-2014). Komisioner periode kedua dilantik dan mulai bertugas pada bulan Desember 2010.

D.4.4 Domisili

Alamat domisili kantor Komisi Yudisial RI adalah di Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat dengan nomor telepon 021-3905876, 3905877, dan nomor fax 021-31903755.